



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 45 /M.SM.03.01/2017
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penilaian Prestasi Kerja PNS

25 September 2017

Yth. (daftar terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2810/M.PAN-RB/08/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 Perihal Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan data hasil rekapitulasi baik melalui aplikasi e-lapkin maupun manual yang kami terima dari BKN sesuai Surat Kepala BKN Nomor: C 26-30/V 90-9/93 Tanggal 24 Juli 2017 Perihal Laporan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2016, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, wajib dilakukan penilaian prestasi kerja oleh Pejabat Penilai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
2. Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan hasil penilaian SKP dan Perilaku Kerja yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya;
3. Terkait dengan angka 1 dan 2, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Instansi Saudara yang **telah menyampaikan** Laporan hasil penilaian SKP periode tahun 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Harapan kami agar hasil penilaian prestasi kerja untuk periode 2017 dan selanjutnya juga disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Selanjutnya untuk lebih memberikan dorongan kepada Instansi Pemerintah untuk menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja PNS di lingkungannya, kami akan mempublikasikan informasi mengenai rekapitulasi penyampaian laporan hasil penilaian prestasi kerja PNS pada situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 kami rencanakan untuk dilaksanakan pada bulan Desember 2017 untuk penilaian prestasi kerja PNS periode tahun 2016.

7. Selanjutnya publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) akan terus diperbaharui dan dipublikasikan secara berkala untuk periode penilaian prestasi kerja 2017 dan selanjutnya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih



Tembusan:
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Lampiran I
 Surat Menteri PAN dan RB
 No: B/ 45 /SM.03.01/2017
 Tgl: 25 September 2017
 Hal: Penilaian Prestasi Kerja PNS

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT YANG TELAH MENGIRIMKAN LAPORAN HASIL
 PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2016

No	Nama Instansi
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7	Kementerian Pemuda dan Olahraga
8	Kementerian Luar Negeri
9	Kementerian Keuangan
10	Kementerian Pertanian
11	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12	Kementerian Perhubungan
13	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14	Kementerian Kesehatan
15	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	Kementerian Kelautan dan Perikanan
17	Kementerian Komunikasi dan Informatika
18	Kementerian Perdagangan
19	Kementerian Perindustrian
20	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21	Kementerian Pariwisata
22	Kementerian Sekretariat Negara
23	Kejaksaan Agung
24	Mahkamah Agung RI ✓
25	Badan Pemeriksa Keuangan
26	Setjen WANTANNAS
27	Lembaga Sandi Negara
28	Badan Kepegawaian Negara
29	Lembaga Administrasi Negara
30	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
31	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
32	Badan Tenaga Nuklir Nasional
33	Badan Pusat Statistik
34	Arsip Nasional Republik Indonesia
35	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

36	Badan Koordinasi Penanaman Modal
37	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
38	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
39	Perpustakaan Nasional RI
40	Badan Standardisasi Nasional
41	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
42	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
43	Sekretariat Kabinet
44	Badan Narkotika Nasional
45	Setjen Komisi Pemilihan Umum
46	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
47	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
48	Setjen Dewan Perwakilan Daerah
49	Badan SAR Nasional
50	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
51	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
52	Ombudsman Republik Indonesia
53	Badan Pengawas Pemilihan Umum
54	Komisi Aparatur Sipil Negara
55	Badan Ekonomi Kreatif